



KECAMATAN KESAMBEN

**DOKUMEN
RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA-PD)**

KECAMATAN KESAMBEN

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT akhirnya Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) PD Kecamatan Kesamben Tahun 2026. Renja Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar Tahun 2026 merupakan bahan materi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2026 yang disusun dengan mengacu pada tema, prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur serta isu-isu strategis Rancangan Teknokratis RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2025-2029

Renja Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar Tahun 2026 memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang direncanakan pada tahun 2025. Dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar Tahun 2026 semoga dapat diimplementasikan sebaik - baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak. Akhirnya atas dukungan dan kerjasama dari semua pihak kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Kesamben, 14 Agustus 2025



HERI WIDYATMOKO, S.Pt.

Pembina Tingkat 1

NIP: 19720115 199803 1 006

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Bab I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
Bab II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra pd	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Daerah	26
2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	32
2.4 Review terhadap Racangan Awal RKPD.....	37
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	49
Bab III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	55
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	55
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	56
3.3 Program dan Kegiatan.....	57
Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	68
Bab V. PENUTUP	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD sd Tahun 2024	21
Tabel 2.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar	28
Tabel 2.4.1 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026	39
Tabel 3.3.1 Rumusan rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2026 Dan prakiraan Maju Maju Tahun 2027	60
Tabel 4.1.1 Program Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2026	68

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah atau selanjutnya disebut Renja. PD adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kantor Kecamatan Kesamben secara efektif, efisien dan terarah sesuai dengan sasaran, perlu adanya rencana kerja secara terinci berdasarkan aturan, kondisi wilayah dan sumber daya manusia yang ada dan rencana kebutuhan anggaran selama satu tahun.

Rencana Kerja Kecamatan Kesamben membahas analisa kebutuhan kantor secara menyeluruh dan program-program yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kabupaten, propinsi dan pusat. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan Penyusunan : Persiapan penyusunan renja meliputi: (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah

dan (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Rancangan

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/ lintas perangkat daerah dan sudah harus selaras dengan RKPD.

3. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

4. Perumusan Rancangan Akhir Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

5. Penetapan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Kesamben Tahun 2026 menjabarkan rencana kegiatan Kecamatan Kesamben yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

Pada penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPDP serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Kesamben 2026 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 123);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
 20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 3/E);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 8/D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah 10/E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 82).
24. Peraturan Bupati Blitar Nomor 73 Tahun 2025 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan renja PD adalah :

1. Tercapainya Keselarasan Dokumen Renja PD dengan RKPD 2026 Dan RPJMD
2. Terwujudnya dokumen perencanaan yang sesuai dengan kaidah perencanaan dan saling bersinergi antar dokumen perencanaan lainnya
3. Tercapainya Indikator Sasaran Renstra Pada Tahun 2026

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Kesamben Tahun 2026 adalah sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggangan PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Sub bab ini berisi uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/Internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD dan;

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

2.4. Review terhadap Racangan Awal RKPD

berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, pokok pikiran DPRD, perguruan tinggi maupun dari PD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada PD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sub bab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD sesuai dengan Visi Misi Rancangan RPJMD tahun 2025-2029.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal : Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian SDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Penanganan Stunting, dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang di rinci menurut sumber pendanaan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD

Pelaksanaan program yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 dalam melaksanakan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang disusun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dengan demikian program/ kegiatan telah dilaksanakan dengan hasil yang baik meskipun untuk tahun mendatang perlu ditingkatkan lagi agar sesuai dengan harapan. Adapun pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai tahun 2024 sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator untuk program ini adalah nilai score SAKIP yang telah diperoleh, yaitu untuk Kecamatan Kesamben adalah 73,35 dengan predikat score adalah BB.

Kegiatan pada program ini adalah:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Pada kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sudah tercapai sampai tribulan IV dengan capaian realisasi keuangan 49,01% atau sebesar Rp. 7.410.000,- dari pagu anggaran Rp. 15.120.000,-
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang sudah tercapai sampai tribulan IV dengan capaian realisasi keuangan 94,92 % atau sebesar Rp. 1.335.215.620,00 dari pagu anggaran Rp. 1.406.665.100,00.
3. Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah
Pada kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah yang sudah tercapai sampai tribulan IV dengan capaian realisasi keuangan 100% atau sebesar Rp 6.054.000,- dari pagu anggaran Rp 6.054.000,-
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pada kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sudah tercapai sampai tribulan IV dengan capaian realisasi keuangan 92,28% atau sebesar Rp.101.510.000,- dari pagu anggaran Rp.110.000.000,-
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang sudah tercapai sampai tribulan IV dengan capaian realisasi keuangan 92,32% atau sebesar Rp 110.012.790,- dari pagu anggaran Rp 119.161.725,-.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pada kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang sudah tercapai sampai tribulan IV dengan capaian realisasi keuangan 98,43 % atau sebesar Rp. 70.250.000,- dari pagu anggaran Rp. 71.367.561,-;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang sudah tercapai sampai tribulan IV dengan capaian realisasi keuangan 90,93 % atau sebesar Rp. 134.926.676,- dari pagu anggaran Rp. 148.382.714,-;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang sudah tercapai sampai tribulan IV dengan capaian realisasi keuangan 98,76 % atau sebesar 141.120.588,45,- dari pagu anggaran Rp. 142.892.000,-;

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Indikator untuk program ini adalah Presentae desa dengan predikat IKM Baik

Kegiatan pada program ini adalah:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Indikator kegiatan ini adalah jumlah koordinasi yang diselenggarakan di Tingkat Kecamatan dengan target kinerja pada tahun 2024 dengan capaian kinerja 100% sampai dengan tribulan IV tahun 2024 dengan pagu anggaran Rp 17.998.000,- dengan capaian realisasi 99,65 % atau Rp 17.935.500,-
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Indikator kegiatan ini adalah jumlah layanan yang dilaksanakan dengan target kinerja pada tahun 2024 dengan capaian kinerja 100 %. sampai dengan tribulan IV tahun 2024 dengan pagu anggaran Rp 8.466.000,- dengan capaian realisasi 99,70 % atau sebesar Rp. 8.440.500,-
3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Indikator kegiatan ini adalah jumlah pelaksanaan dengan target kinerja pada tahun 2023 dengan capaian kinerja 100 % sampai dengan tribulan IV tahun 2024. dengan pagu anggaran Rp 8.600.000,- dengan capaian realisasi 100% atau sebesar Rp 8.600.000,-.

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Indikator program ini adalah jumlah pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target kinerja tahun 2024 sebesar 5 kali dan tercapai dengan capaian kinerja 100%.

Kegiatan pada program ini adalah:

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

Indikator kegiatan adalah jumlah koordinasi yang dilaksanakan. capaian kinerja 100 %. sampai dengan tribulan IV tahun 2024 dengan pagu anggaran adalah Rp. 15.788.000,00,- dengan capaian realisasi sampai tribulan IV adalah 99,70% atau sebesar Rp 15.740.000,00,-.

2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

Indikator kegiatan adalah jumlah kegiatan yang dilaksanakan. capaian kinerja 100 %. sampai dengan tribulan IV tahun 2024 dengan pagu anggaran adalah Rp. 12.720.000,00,- dengan capaian realisasi sampai tribulan IV adalah 99,90% atau sebesar Rp 12.707.000,00,-.

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator program ini adalah jumlah koordinasi dan fasilitasi penegakan perda dan perkara yang dilakukan dengan target kinerja tahun 2024 sebesar 2 kali dan tercapai dengan capaian kinerja 100%.

Kegiatan program ini adalah :

1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Indikator kegiatan ini adalah jumlah kegiatan dan koordinasi yang dilaksanakan dengan target kinerja pada tahun 2024 dengan capaian kinerja 100 % sampai dengan tribulan IV tahun 2024 dengan pagu anggaran Rp 31.466.900,- dengan capaian realisasi 98,82% atau sebesar Rp 31.096.000,-..

2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Indikator kegiatan ini adalah jumlah koordinasi dan fasilitasi penegakan perda dan perkara yang dilakukan dengan target kinerja pada tahun 2024 dengan capaian kinerja 100 % sampai dengan tribulan IV tahun 2024 dengan pagu anggaran Rp 17.848.350,- dengan capaian realisasi 99,95% atau sebesar Rp 17.840.000,-..

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator program ini adalah jumlah Jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yang dilakukan dengan target kinerja tahun 2024 sebesar 3 kali dan tercapai dengan capaian kinerja 100%.

Kegiatan pada program ini adalah:

1. Keegiatannya: Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Indikator program ini adalah jumlah Jumlah koordinasi yang diselenggarakan dengan target kinerja tahun 2024 sebesar 3 kali dan tercapai dengan capaian kinerja 100 %. dengan. Pagu anggaran sebesar Rp 21.735.250,- dengan capaian realisasi sampai tribulan IV adalah 99.56 %. atau sebesar Rp 21.640.000,-.

f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Indikator program ini adalah jumlah Peraturan Perundang-undangan Desa Yang dibuat dengan target kinerja tahun 2024 sebesar 10 kali dan tercapai dengan capaian kinerja 100%.

Kegiatan pada program ini adalah:

1. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Indikator program adalah Jumlah rekomendasi,koordinasi, dan pengawasan yang dilaksanakan dengan capaian kinerja 100 %. Pagu anggaran adalah Rp 51.088.000,- dengan capaian realisasi sampai tribulan IV adalah 99,98% atau sebesar Rp 51.080.000,-.

Pada Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II, Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota indikatornya Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target 100.

Kegiatan pada program ini adalah:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah indikatornya Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan.

Sub kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah indikatornya jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dengan pagu Rp 3.918.000,00 terealisasi Rp. 0,00.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah indikatornya persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel dengan target 100%.

Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN dari pagu anggaran sebesar Rp 1.383.934.066,00 telah terealisasi sebesar Rp 874.708.715,00,-, atau sebesar 63,20%;

Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dari pagu anggaran sebesar Rp 39.060.000,00 telah terealisasi sebesar Rp 13.020.000,00. atau sebesar 33,33%;

Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dari pagu anggaran sebesar Rp 4.080.000,00 belum terealisasi.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dari pagu anggaran sebesar Rp 1.530.000,00 belum terealisasi.

3. Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah

Indikator persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik dengan target 100%.

Pada kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Dari pagu anggaran sebesar Rp 2.850.000,- belum terealisasi.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target 100%.

Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebesar Rp.35.000.000,- belum terealisasi.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Persentase pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel dengan target 100%.

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp 4.112.500,00 telah terealisasi sebesar Rp 4.030.000,-, atau sebesar 97,99%;

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sebesar Rp 3565600,00 telah terealisasi sebesar Rp 3.506.000,-, atau sebesar 98,33%;

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp 3.281.750,00 telah terealisasi sebesar Rp 1.882.000,-, atau sebesar 57,35%;

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp 7.840.000,- telah terealisasi sebesar Rp 3.920.000,00 atau sebesar 50%;

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp 31.835.500,00 telah terealisasi sebesar Rp 11.395.000,00 atau sebesar 35,79%;

Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD sebesar Rp 3.850.000,00 Belum terealisasi.;

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran dengan target 100%

Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pagu anggaran Rp. 14.738.900,00,- belum direalisasikan;

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu dengan target 100%.

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dari pagu anggaran Rp. 31.089.000,- telah di realisasikan sebesar Rp 7.807.337,- atau sebesar 25,11%;

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dari pagu anggaran Rp. 26.114.500 telah di realisasikan sebesar Rp 24.720.000,- atau sebesar 94,66%;

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dari pagu anggaran Rp. 84.652.368,- sudah di realisasikan sebesar Rp 34.069.514 atau sebesar 40,25%;

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai sasaran dengan target 100%.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu anggaran sebesar Rp 67.200.000,00 terealisasi Rp 18.556.500,00 atau sebesar 27,61%;

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp 8.560.000,00 terealisasi Rp 1.800.000,00 atau sebesar 21,03%;

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp 158.670.000,00 belum terealisasi;

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Dengan indicator Presentae desa dengan predikat IKM Baik

Kegiatan program ini adalah:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator kegiatan ini adalah jumlah koordinasi yang diselenggarakan di Tingkat Kecamatan dengan target 2 kali

Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dengan pagu anggaran Rp 6.700.000,- belum terealisasi;

Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan pagu anggaran Rp 5.100.000,- belum terealisasi;

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Indikator kegiatan ini adalah jumlah layanan yang dilaksanakan dengan target 1 layanan.

Sub kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan dengan pagu anggaran Rp 6.600.000,- belum terealisasi;

3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan dengan target 12 Dokumen

Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan pagu anggaran Rp 8.220.000,- belum terealisasi;

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Indikator program ini adalah jumlah pemberdayaan masyarakat Desa dengan target 1 pemberdayaan.

Kegiatan program ini adalah:

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dengan target 2 kali.

Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan pagu anggaran Rp 7.050.000,- telah di realisasikan sebesar Rp 7.050.000; atau sebesar 100%;

Sub kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan dengan pagu anggaran Rp 6.900.000,- belum terealisasi;

2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Indikator kegiatan adalah jumlah keluarga yang mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara dengan target 100 keluarga.

Sub kegiatan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara dengan pagu anggaran Rp 13.800.000,- telah di realisasikan sebesar Rp 5.700.000; atau sebesar 41,30%;

d. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator program ini adalah Jumlah koordinasi dan fasilitasi penegakan perda dan perkara yang dilakukan dengan target 2 kali.

Kegiatan program ini adalah:

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator kegiatan ini adalah jumlah kegiatan dan koordinasi yang dilaksanakan dengan target 6 kali.

Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan pagu anggaran Rp 25.945.000,- belum direalisasikan;

Sub kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dengan pagu anggaran Rp 7.500.000,- belum direalisasikan;

2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Indikator kegiatan ini adalah jumlah koordinasi dan fasilitasi penegakan perda dan perkara yang dilakukan dengan target 1 kali.

Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pagu anggaran Rp 7.030.000,- belum direalisasikan;

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator program ini adalah Jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yang dilakukan dengan target 3 kali.

Kegiatan program ini adalah:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Indikator program ini adalah Jumlah koordinasi yang diselenggarakan dengan target 3 kali.

Sub kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pagu anggaran Rp 9.100.000,00 belum direalisasikan;

Sub kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dengan pagu anggaran Rp 6.800.000,00 belum direalisasikan;

Sub kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dengan pagu anggaran Rp 5.630.000,00 belum direalisasikan.

f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Indikator program adalah Jumlah Peraturan Perundang-undangan Desa Yang dibuat dengan target 20 Peraturan perundang-undangan desa.

Kegiatan program ini adalah:

1. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Indikator program adalah Jumlah rekomendasi, koordinasi, dan pengawasan yang dilaksanakan dengan target 10 Rekomendasi, koordinasi dan pengawasan.

Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dengan pagu anggaran Rp 8.300.000,00 belum direalisasikan;

Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan pagu anggaran Rp 6.100.000,00 belum direalisasikan;
Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan pagu anggaran Rp 6.750.000,00 belum direalisasikan;
Sub kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa dengan pagu anggaran Rp 6.700.000,00 belum direalisasikan;;
Sub kegiatan Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan pagu anggaran Rp 4.500.000,00 belum direalisasikan;
Sub kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya dengan pagu anggaran Rp 9.550.000,00 belum direalisasikan;

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan secara keseluruhan persentase penyerapan anggaran Kecamatan Kesamben Tahun 2024 sebesar 95,38 % dan Penyerapan anggaran di tahun 2025 semester 1 (Januari sd Juni 2025) sebesar 49,13%. Ada 2 sub kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai anggarn kas.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan:

1. Pada tahun 2024 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan tidak ada. Sedangkan untuk pelaksanaan anggaran di tahun 2025 semester 1 ada beberapa sub kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai dengan anggaran kas.
2. Pada tahun 2024 Realisasi program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan, Sedangkan untuk pelaksanaan anggaran di tahun 2025 semester 1 ada beberapa sub kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai dengan anggaran kas.
3. Pada tahun 2024 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan tidak ada.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan :
 - a. Kurangnya ketersediaan SDM yang mengakibatkan *overload* pekerjaan masing-masing staf.
Sebagai miniatur Pemerintah Daerah di wilayah, sudah seharusnya kualitas dan kuantitas SDM yang ada (harus) dipilhkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) berkualitas yang ada di Kabupaten Blitar.

- Kompleksnya berbagai pekerjaan di Kecamatan harus berbanding lurus dengan aparatur yang ada.
- b. Adanya kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan, dikarenakan pada tahun berjalan ada kegiatan insidental yang sebelumnya belum masuk pada perencanaan sehingga perlu adanya penyesuaian pada saat perubahan rencana anggaran.
 - c. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien;
 - d. Kurangnya Koordinasi yang baik antara ASN, yang berakibat kesalahpahaman diantara ASN.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah. Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kesamben adalah sebagai berikut:
- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kesamben tahun 2021-2026 berdampak positif yang menunjukkan keberhasilan kinerja selama periode Renstra.
 - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kesamben berdampak rendahnya capaian kinerja selama periode Renstra sehingga perlu dilakukan evaluasi dan monev dan diperlukan tinjauan ulang terhadap target Renja periode tahun berikutnya.
6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :
- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
 - b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan.
 - c. Perlu adanya pengusulan penambahan personil pegawai di Kecamatan Kesamben kepada Dinas Pengampu.

Rincian evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 dan capaian Renstra disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD sd Tahun 2024
Kabupaten Blitar

Nama SKPD: Kecamatan Kesamben

Lembar : 1 dari 5

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp			
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100%		14=6*12		15=(14/5)*100% Rp=14			
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	10.016.405.084,00	- 100	7.342.666.000,00	100	2.005.988.700,00	100	354.775.223,00	100	529.677.015,00	100	371.427.142,00	100	650.620.294,00	100	1.906.499.674,00	100,00	95,04	100,00	9.249.165.674,00	100,00	100,00	9.249.165.674,00	Kecamatan Kesamben	
2	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	- 40	56.868.312,00	- 24	12.356.000,00	- 8	15.120.000,00	- 2	0,00	- 2	7.410.000,00	- 2	0,00	- 2	0,00	- 8	7.410.000,00	80,00	49,01	- 32	19.766.000,00	80,00	34,76	19.766.000,00	Kecamatan Kesamben
3	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- 95	56.868.312,00	- 38	12.356.000,00	- 19	15.120.000,00		0,00	- 8	7.410.000,00		0,00	- 8	7.410.000,00	- 8,42	49,01	- 8	19.766.000,00	- 8,42	34,76	19.766.000,00	Kecamatan Kesamben		
4	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabe	- 10	9.886.479.684,00	- 6	7.863.945.823,00	- 2	2.583.284.900,00		571.185.482,00		877.468.270,00		551.028.909,00	- 2	476.628.153,00	- 2	2.476.310.814,00	80,00	95,86	- 8	10.340.256.637,00	80,00	104,59	10.340.256.637,00	Kecamatan Kesamben
5	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	- 80	8.276.675.523,00	- 50	6.451.415.600,00	- 16	1.349.214.300,00		322.342.293,00		461.447.721,00		290.921.329,00		215.571.777,00		1.290.283.120,00	112,50	95,63	- 90	7.741.698.720,00	112,50	93,54	7.741.698.720,00	Kecamatan Kesamben
6	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- 45	213.221.000,00	- 9,00	34.260.000,00	- 9	35.460.000,00		5.910.000,00		5.910.000,00		11.820.000,00		11.820.000,00		35.460.000,00	73,33	100,00	- 33	69.720.000,00	73,33	32,70	69.720.000,00	Kecamatan Kesamben
7	7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- 105	6.454.875,00	- 7	1.820.000,00	- 21	9.120.000,00		0,00		0,00	- 2	4.500.000,00		4.535.000,00		9.035.000,00	16,19	99,07	- 17	10.855.000,00	16,19	168,17	10.855.000,00	Kecamatan Kesamben
8	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- 80	18.004.063,00	- 24	4.326.000,00	- 12	444.000,00		0,00		0,00		0,00	- 1	437.500,00	- 1	437.500,00	31,25	98,54	- 25	4.763.500,00	31,25	26,46	4.763.500,00	Kecamatan Kesamben
9	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		- 650	21.610.063,00	- 520	4.325.000,00	1030	6.054.000,00		0,00		0,00		30	6.054.000,00		0,00	130	100,00	- 650	10.379.000,00	100,00	48,03	10.379.000,00	Kecamatan Kesamben	
10	7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	- Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	- 10	21.610.063,00	- 4	4.325.000,00	- 2	6.054.000,00		0,00		0,00	- 2	6.054.000,00		0,00	- 2	6.054.000,00	60,00	100,00	- 6	10.379.000,00	60,00	48,03	10.379.000,00	Kecamatan Kesamben
11	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- 5	91.435.110,00	- 3	40.000.000,00	- 1	110.000.000,00		0,00		0,00		0,00	- 1	101.510.000,00	- 1	101.510.000,00	80,00	92,28	- 4	141.510.000,00	80,00	154,77	141.510.000,00	Kecamatan Kesamben
12	7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	- 80	91.435.110,00	- 10	40.000.000,00	- 13	110.000.000,00		0,00		0,00		0,00		101.510.000,00		101.510.000,00	28,75	92,28	- 23	141.510.000,00	28,75	154,77	141.510.000,00	Kecamatan Kesamben

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100%		14=6+12		15=(14/5)*100% Rp=14								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp				
13	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	- 100	234.399.866,00	- 100	176.449.428,00	- 100	119.161.725,00	- 100	11.250.000,00	- 100	15.200.000,00	- 100	18.992.000,00	- 100	64.570.790,00	- 100	110.012.790,00	- 100,00	92,32	- 100,00	286.462.218,00	- 100,00	122,21	286.462.218,00	Kecamatan Kesamben	
14	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- 30	7.858.441,00	- 5	2.943.600,00	- 6	3.574.755,00		0,00		0,00	- 6	3.432.000,00		0,00	- 6	3.432.000,00	- 36,67	96,01	- 11	6.375.600,00	- 36,67	81,13	6.375.600,00	Kecamatan Kesamben	
15	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- 10	15.609.438,00	- 4	3.090.000,00	- 2	5.443.218,00		0,00		0,00	- 1	5.234.900,00	- 1	5.234.900,00	- 50,00	96,17	- 5	8.324.900,00	- 50,00	53,33	8.324.900,00	Kecamatan Kesamben			
16	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- 20	17.728.957,00	- 8	3.116.000,00	- 4	5.675.652,00		0,00		0,00	- 4	5.593.500,00	- 4	5.593.500,00	- 60,00	98,55	- 12	8.709.500,00	- 60,00	49,13	8.709.500,00	Kecamatan Kesamben			
17	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	- 5	47.306.957,00	- 1,00	18.720.728,00	- 1	12.998.100,00		0,00		6.200.000,00		0,00	- 1	6.630.000,00	- 1	12.830.000,00	- 40,00	98,71	- 2	31.550.728,00	- 40,00	66,69	31.550.728,00	Kecamatan Kesamben	
18	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- 60	135.848.457,00	- 24	144.066.600,00	- 12	88.270.000,00	- 3	11.250.000,00	- 3	9.000.000,00	- 3	15.560.000,00	- 3	43.912.390,00	- 12	79.722.390,00	- 60,00	90,32	- 36	223.788.990,00	- 60,00	164,73	223.788.990,00	Kecamatan Kesamben	
19	7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- 60	10.047.616,00	- 21	4.512.500,00	- 12	3.200.000,00		0,00		0,00	- 12	3.200.000,00	- 12	3.200.000,00	- 55,00	100,00	- 33	7.712.500,00	- 55,00	76,76	7.712.500,00	Kecamatan Kesamben			
20	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah jenis pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	- 17	269.958.318,00	- 11	88.109.200,00	- 4	71.367.561,00		0,00		0,00	- 4	70.250.000,00	- 4	70.250.000,00	- 88,24	98,43	- 15	158.359.200,00	- 88,24	58,66	158.359.200,00	Kecamatan Kesamben			
21	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	- Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- 10	151.625.000,00	- 2	23.440.000,00	- 2	43.383.795,00		0,00		0,00	- 2	43.220.000,00	- 2	43.220.000,00	- 40,00	99,62	- 4	66.660.000,00	- 40,00	43,96	66.660.000,00	Kecamatan Kesamben			
22	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- 10	118.333.318,00	- 1	64.669.200,00	- 2	27.983.766,00		0,00		0,00	- 2	27.030.000,00	- 2	27.030.000,00	- 30,00	96,59	- 3	91.699.200,00	- 30,00	77,49	91.699.200,00	Kecamatan Kesamben			
23	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	- 100	444.721.376,00	- 100	236.483.772,00	- 100	147.155.114,00	- 100	15.272.930,00	- 100	22.909.294,00	- 100	21.457.213,00	- 100	75.287.239,00	- 100	134.926.676,00	- 100,00	91,69	- 100	371.410.448,00	- 100,00	83,52	371.410.448,00	Kecamatan Kesamben	
24	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- 60	101.997.429,00	- 3	41.007.600,00	- 12	22.337.000,00	- 3	2.804.930,00	- 3	4.207.294,00	- 3	2.755.213,00	- 3	6.425.139,00	- 12	16.192.576,00	- 25,00	72,49	- 15	57.200.176,00	- 25,00	56,08	57.200.176,00	Kecamatan Kesamben	
25	7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- 60	110.134.447,00	- 3	50.667.590,00	- 12	49.993.194,00		0,00		0,00	- 12	43.926.100,00	- 12	43.926.100,00	- 25,00	87,86	- 15	94.593.690,00	- 25,00	85,89	94.593.690,00	Kecamatan Kesamben			
26	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- 60	232.589.500,00	- 3	144.808.582,00	- 12	74.824.920,00	- 3	12.468.000,00	- 3	18.702.000,00	- 3	18.702.000,00	- 3	24.936.000,00	- 12	74.808.000,00	- 25,00	99,98	- 15	219.616.582,00	- 25,00	94,42	219.616.582,00	Kecamatan Kesamben	
27	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah w aktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	- 12	383.056.578,00	- 12	293.121.000,00	- 12	142.892.000,00		0,00		16.800.000,00		17.682.600,00	- 12	106.637.988,00	- 12	141.120.588,00	- 100,00	98,76	- 12,00	434.241.588,00	- 100,00	113,36	434.241.588,00	Kecamatan Kesamben	
28	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya	- 60	208.615.563,00	- 3	100.200.000,00	- 12	67.200.000,00		0,00	- 6	16.800.000,00	- 3	17.682.600,00	- 3	32.550.000,00	- 12	67.032.600,00	- 25,00	99,75	- 15	167.232.600,00	- 25,00	80,16	167.232.600,00	Kecamatan Kesamben	
29	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- 30	17.096.640,00	- 6	8.126.000,00	- 6	10.970.000,00		0,00		0,00		0,00	- 6	9.955.000,00	- 6	9.955.000,00	- 40,00	90,75	- 12	18.081.000,00	- 40,00	105,76	18.081.000,00	Kecamatan Kesamben	

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100%		14=6+12		15=(14/5)*100% Rp=14										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp								
30	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- 5	157.344.375,00	- 1	184.795.000,00	- 1	64.722.000,00		0,00		0,00		0,00	- 1	64.132.988,00	- 1	64.132.988,00	-	40,00	99,09	- 2	248.927.988,00	-	40,00	158,21	248.927.988,00	Kecamatan Kesamben					
31	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	- Persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik	- 100	336.879.407,00	- 87	45.907.500,00	- 95	35.064.000,00	-	25	0,00	-	50	0,00	-	70	8.627.500,00	-	95	17.748.500,00	-	95	26.376.000,00	-	95,00	75,22	- 95	72.283.500,00	-	95,00	95,00	72.283.500,00	Kecamatan Kesamben
32	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- umlah Koordinasi yang diselenggarakan di tingkat Kecamatan Persentase Desa/Kelurahan dengan desa peringkat IKM terbaik	- 12	171.192.022,00	- 12	25.777.500,00	- 12	17.998.000,00		0,00		0,00		3.907.500,00	-	12	14.028.000,00	-	12	17.935.500,00	-	100,00	99,65	- 12	43.713.000,00	-	100,00	25,53	43.713.000,00	Kecamatan Kesamben			
33	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	- Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	- 10	102.708.486,00	- 4	11.165.000,00	- 2	7.910.000,00		0,00		0,00	- 1	3.907.500,00	- 1	3.953.000,00	- 2	7.860.500,00	-	60,00	99,37	- 6	19.025.500,00	-	60,00	18,52	19.025.500,00	Kecamatan Kesamben					
34	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	95%	68.483.536,00	- 90	14.612.500,00	- 95	10.088.000,00		0,00		0,00		10	10.075.000,00	-	10	10.075.000,00	-	105,26	99,87	- 100	24.687.500,00	-	105,26	36,05	24.687.500,00	Kecamatan Kesamben				
35	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	- Jumlah layanan yang dilaksanakan	- 16	100.990.478,00	- 10	11.495.000,00	- 4	8.466.000,00		0,00		0,00		4.720.000,00	- 4	3.720.500,00	- 4	8.440.500,00	-	87,50	99,70	- 14	19.935.500,00	-	87,50	19,74	19.935.500,00	Kecamatan Kesamben					
36	7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	- Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	- 20	100.990.478,00	- 7	11.495.000,00	- 4	8.466.000,00		0,00		0,00	- 2	4.720.000,00		3.720.500,00	- 2	8.440.500,00	-	45,00	99,70	- 9	19.935.500,00	-	45,00	19,74	19.935.500,00	Kecamatan Kesamben					
37	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		- 39	64.696.907,00	- 29	8.635.000,00	- 10	8.600.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	-	0,00	0,00		8.635.000,00	-	0,00	13,35	8.635.000,00	Kecamatan Kesamben					
38	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	- 250	64.696.907,00	- 90	8.635.000,00	- 50	8.600.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	-	36,00	0,00	- 90	8.635.000,00	-	36,00	13,35	8.635.000,00	Kecamatan Kesamben					
39	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	- Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.	- 10	1.323.894.252,00	- 6	20.500.000,00	- 2	28.508.000,00		0,00		10.332.000,00		0,00	- 2	17.072.000,00	- 2	27.404.000,00	-	80,00	96,13	- 8	47.904.000,00	-	80,00	80,00	47.904.000,00	Kecamatan Kesamben					
40	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	- Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	- 12	1.286.394.252,00	- 12	20.500.000,00	- 12	15.788.000,00		0,00		4.500.000,00		0,00	-	12	11.240.000,00	-	12	15.740.000,00	-	100,00	99,70	- 12	36.240.000,00	-	100,00	2,82	36.240.000,00	Kecamatan Kesamben			
41	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	- Jumlah Lembaga Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	100%	875.025.570,00	-	100	10.500.000,00	-	100	7.700.000,00		0,00	-	100	4.500.000,00		0,00	- 1	3.200.000,00	-	101	201,00	100,00	- 201	18.200.000,00	-	201,00	2,08	18.200.000,00	Kecamatan Kesamben		
42	7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	- Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	- 10	411.368.682,00	- 4	10.000.000,00	- 2	8.088.000,00		0,00		0,00		0,00	- 2	8.040.000,00	- 2	8.040.000,00	-	60,00	99,41	- 6	18.040.000,00	-	60,00	4,39	18.040.000,00	Kecamatan Kesamben					
43	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		- 60	37.500.000,00		0,00	- 30	12.720.000,00		0,00		5.832.000,00	-	30	0,00		5.832.000,00	-	30	11.664.000,00	-	50,00	91,70	- 30	11.664.000,00	-	50,00	31,10	11.664.000,00	Kecamatan Kesamben			

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100%		14=6+12		15=(14/5)*100% Rp=14														
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp												
44	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	- Jumlah Keluarga yang mengikut Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		37.500.000,00		0,00	-	100		12.720.000,00		0,00	-	50		5.832.000,00		0,00	-	50		5.832.000,00		-	100		11.664.000,00		91,70			11.664.000,00		31,10		11.664.000,00	Kecamatan Kesamben
45	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	- Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	- 5	491.567.363,00	- 3	5.740.000,00	- 1	49.315.250,00		0,00		16.950.000,00		12.496.000,00	- 1	19.490.000,00	- 1	48.936.000,00	-	80,00	99,23	- 4	54.676.000,00	-	80,00	80,00	54.676.000,00	-	80,00	80,00	54.676.000,00	Kecamatan Kesamben					
46	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	- Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	- 10	606.738.463,00	- 6	11.800.000,00	- 2	37.436.900,00		0,00		6.900.000,00		27.684.700,00	- 2	30.988.700,00	- 2	65.573.400,00	-	80,00	175,16	- 8	77.373.400,00	-	80,00	12,75	77.373.400,00	Kecamatan Kesamben									
47	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- 20	491.567.363,00	- 4	5.740.000,00	- 4	24.566.900,00		0,00		0,00	- 2	12.496.000,00	- 2	11.700.000,00	- 4	24.196.000,00	-	40,00	98,49	- 8	29.936.000,00	-	40,00	6,09	29.936.000,00	Kecamatan Kesamben									
48	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	- Jumlah koordinasi yang dilaksanakan		0,00		0,00	- 2	6.900.000,00		0,00	- 2	6.900.000,00		0,00		0,00	- 2	6.900.000,00		100,00			6.900.000,00				6.900.000,00	Kecamatan Kesamben									
49	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	- Jumlah pembinaan kerukunan antar suku umat beragama ras dan golongan lainnya yang dilakukan	- 37	0,00	- 21	0,00	- 8	17.848.350,00		0,00		10.050.000,00		0,00		7.790.000,00		17.840.000,00	-	0,00	99,95		17.840.000,00	-	0,00		17.840.000,00	Kecamatan Kesamben									
50	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	- jumlah koordinasi yang dilaksanakan		0,00		0,00	- 1	17.848.350,00		0,00	- 1	10.050.000,00		0,00	- 1	7.790.000,00	- 2	17.840.000,00		99,95			17.840.000,00				17.840.000,00	Kecamatan Kesamben									
51	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	- Jumlah pembinaan kerukunan antar suku umat beragama ras dan golongan lainnya yang dilakukan	- 5	461.345.021,00	- 3	30.125.000,00	- 1	21.735.250,00		0,00		4.500.000,00		12.540.000,00	- 1	4.600.000,00	- 1	21.640.000,00	-	80,00	99,56	- 4	51.765.000,00	-	80,00	80,00	51.765.000,00	Kecamatan Kesamben									
52	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	- Jumlah koordinasi yang diselenggarakan	- 10	461.345.021,00	- 6	30.125.000,00	- 2	21.735.250,00		0,00		4.500.000,00		12.540.000,00	- 2	4.600.000,00	- 2	21.640.000,00	-	80,00	99,56	- 8	51.765.000,00	-	80,00	11,22	51.765.000,00	Kecamatan Kesamben									
53	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	- Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	- 5	89.685.551,00	- 1	6.665.000,00	- 2	9.100.000,00		0,00	- 1	4.500.000,00		0,00	- 1	4.600.000,00	- 2	9.100.000,00	-	60,00	100,00	- 3	15.765.000,00	-	60,00	17,58	15.765.000,00	Kecamatan Kesamben									
54	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	- Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	- 5	278.152.887,00	- 1	14.460.000,00	- 1	6.148.350,00		0,00		0,00	- 1	6.100.000,00		0,00	- 1	6.100.000,00	-	40,00	99,21	- 2	20.560.000,00	-	40,00	7,39	20.560.000,00	Kecamatan Kesamben									
55	7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	- Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	- 5	93.506.583,00	- 1	9.000.000,00	- 1	6.486.900,00		0,00		0,00	- 1	6.440.000,00		0,00	- 1	6.440.000,00	-	40,00	99,28	- 2	15.440.000,00	-	40,00	16,51	15.440.000,00	Kecamatan Kesamben									

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Ki		Kr	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100%		14=6+12		15=(14/5)*100% Rp=14			16
56	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	- Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat	- 14	534.407.584,00	- 14	162.677.000,00	- 14	51.088.000,00	6.000.000,00		8.580.000,00		6.000.000,00	- 14	30.500.000,00	- 14	51.080.000,00	- 100,00	99,98	- 14,00	213.757.000,00	- 100,00	100,00	213.757.000,00	Kecamatan Kesamben	
57	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	- Jumlah rekomendasi dan pengawasan yang dilakukan	- 14	602.907.584,00	- 14	168.077.000,00	- 14	58.738.000,00	6.000.000,00		10.155.000,00		6.000.000,00	- 14	30.500.000,00	- 14	52.655.000,00	- 100,00	89,64	- 14	220.732.000,00	- 100,00	36,61	220.732.000,00	Kecamatan Kesamben	
58	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	- Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	- 50	41.812.500,00	- 10	11.637.000,00	- 10	8.588.000,00	0,00		8.580.000,00		0,00		0,00		8.580.000,00	- 20,00	99,91	- 10	20.217.000,00	- 20,00	48,35	20.217.000,00	Kecamatan Kesamben	
59	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	- Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	- 50	57.982.500,00	- 10	13.450.000,00	- 10	6.000.000,00	0,00		0,00	- 10	6.000.000,00		0,00	- 10	6.000.000,00	- 40,00	100,00	- 20	19.450.000,00	- 40,00	33,54	19.450.000,00	Kecamatan Kesamben	
60	7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	- Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	- 50	56.503.209,00	- 10	8.325.000,00	- 10	7.500.000,00	0,00		0,00		0,00	- 10	7.500.000,00	- 10	7.500.000,00	- 40,00	100,00	- 20	15.825.000,00	- 40,00	28,01	15.825.000,00	Kecamatan Kesamben	
61	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	- Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	- 10	180.000.000,00		74.000.000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	- 0,00			74.000.000,00	- 0,00	41,11	74.000.000,00	Kecamatan Kesamben	
62	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	- Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	- 10	139.100.000,00	- 2	44.200.000,00	- 2	6.000.000,00	6.000.000,00		0,00		0,00		0,00		6.000.000,00	- 20,00	100,00	- 2	50.200.000,00	- 20,00	36,09	50.200.000,00	Kecamatan Kesamben	
63	7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	- Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	- 10	59.009.375,00	- 2	11.065.000,00	- 10	6.000.000,00	0,00		0,00		0,00	- 10	6.000.000,00	- 10	6.000.000,00	- 120,00	100,00	- 12	17.065.000,00	- 120,00	28,92	17.065.000,00	Kecamatan Kesamben	
64	7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	- Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		0,00		0,00	- 10	8.000.000,00	0,00		0,00		0,00	- 10	8.000.000,00	- 10	8.000.000,00		100,00		8.000.000,00			8.000.000,00	Kecamatan Kesamben	
65	7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	- Jumlah Laporan Hasil Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan		0,00		0,00	- 10	9.000.000,00	0,00		0,00		0,00	- 10	9.000.000,00	- 10	9.000.000,00		100,00		9.000.000,00			9.000.000,00	Kecamatan Kesamben	
TOTAL					13.164.498.711,00		7.607.615.500,00		2.191.699.200,00	360.775.223,00		570.039.015,00		411.090.642,00		740.030.794,00		2.081.935.674,00		565,17		9.689.551.174,00			9.689.551.174,00		
Rata-rata Capaian Kinerja Program																				89,17%	29,96%						
Predikat Kinerja Program																				Tinggi	Sangat Rendah						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																											
Faktor Penghambat pencapaian Kinerja :																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPd berikutnya :																											

Blitar, 06 Januari 2025
CAMAT KESAMBEN
 KECAMATAN KESAMBEN
 HERI WIDYATMOKO, S.Pt
 Pembina TK
 NIP. 19720115 199803 1 006

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Kesamben telah menentukan target atas kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan Pemerintah Daerah Nomor 6 Tahun 2008.

Indikator tujuan dan sasaran yang telah ditentukan targetnya oleh Kecamatan Kesamben pada tahun 2024 telah disesuaikan dengan indikator pada RKPD Kabupaten Blitar tahun 2024 dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Berdasarkan tugas dan fungsi kecamatan, maka di Kecamatan Kesamben dilaksanakan program penunjang dan program wajib sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 2.019.643.100,-
Indikatornya adalah: Nilai SAKIP Kecamatan yang bernilai 73,35 ‘BB’

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah
- b. Administrasi keuangan perangkat daerah
- c. Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
- e. Administrasi umum perangkat daerah
- f. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- g. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
- h. Pemeliharaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan anggaran sebesar Rp. 35.064.000,- Indikatornya adalah: Persentase desa/kelurahan dengan IKM baik

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
 - c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp. 28.508.000,- Indikatornya adalah Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dengan desa.
Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
- a. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp.51.088.000,- Indikatornya adalah: Jumlah peraturan perundang-undangan desa yang telah dibuat.
Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
- a. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa
5. Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar 49.315.250,-
Indikatornya adalah: Jumlah koordinasi dan fasilitasi Penegakan perda dan Perkada yang dilakukan
Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran sebesar Rp. 21.735.250,- Indikatornya adalah: Jumlah Koordinasi yang diselenggarakan
Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah

Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar

No	Indikator	SPM/ Standart nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2023 (Th-2)	Tahun 2024 (Th-1)	Tahun 2025 (Th n)	Tahun 2026 (Th+1)	Tahun 2023 (Th-2)	Tahun 2024 (Th-1)	Tahun 2025 (Th n)	Tahun 2026 (Th n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Indikator tujuan dan sasaran :											
	Indeks Kepuasan Masyarakat			83	83,5	84	84,5	100%	100%	100%	100%	
	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti			91%	92%	93%	95%	100%	100%	100%	100%	
	Indeks Kesalehan Sosial			84 (Baik)	86 (Sangat Baik)	88 (Sangat Baik)	90 (Sangat Baik)					
	Persentase Penurunan Pelanggaran trantibum di wilayah Kecamatan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Predikat SAKIP Perangkat Daerah			B	B	BB	BB	B	B	BB	B	
	Persentase desa mandiri di kecamatan			21%	28%	35%	43%					
	Nilai SAKIP			69,50	70	71	72	60.05	62,20	73,35	72	
	Persentase desa yang memiliki administrasi baik			56%	64%	71%	78%	100%	100%	100%	78%	
	Jumlah Bumdes yang dikelola dengan baik			5	6	7	8	5	6	7	8	

2	Indikator Program dan Kegiatan :											
2.1	persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik			90	90	90	100	100	100	100	100	
	Jumlah koordinasi yang diselenggarakan di Tingkat Kecamatan			2	2	2	2	2	2	2	2	
	Jumlah Layanan yang dilaksanakan			1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan			1	1	1	1	1	1	1	1	
2.2	jumlah koordinasi dan fasilitasi penegakan perda dan perkara yang dilakukan			2	2	2	2	2	2	2	2	
	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan			6	6	6	6	6	6	6	6	
	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi penegakan perda dan perkara yang dilakukan			1	1	1	1	1	1	1	1	
2.3	Jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yang dilakukan			3	3	3	3	3	3	3	3	
	Jumlah koordinasi yang diselenggarakan			3	3	3	3	3	3	3	3	
2.4	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada progrsm penunjang urusan pemerintahan daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase dokumen			100	100	100	100	100	100	100	100	

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan												
Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai sasaran			100	100	100	100	100	100	100	100	100	

2.5	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan			2	2	2	2	2	2	2	2	
	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan			2	2	2	2	2	2	2	2	
2.6	Jumlah peraturan perundang-undangan desa yang dibuat			20	20	20	20	24	20	20	20	
	Jumlah Rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan yang dilaksanakan			10	10	10	10	10	10	10	10	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dapat disimpulkan tugas kecamatan adalah melaksanakan urusan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dari uraian di atas tersebut dapat diketahui kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan disamping harus memfasilitasi tugas dari SKPD-SKPD yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Desa. Hal ini bisa terlaksana dengan baik bila didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya masih perlu ditingkatkan lagi. Disamping itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka diharapkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan dasar publik harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan. Faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factors*) merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan keberhasilan Kecamatan Kesamben. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan, sehingga lebih efisien dan efektif.

Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Kesamben. Dari hasil analisis jabatan yang dilakukan, jumlah pegawai yang seharusnya ada di kecamatan sekitar 26 orang sementara keadaan riil yang ada jumlah pegawai hanya sejumlah 11 (Sebelas) orang untuk menangani semua bidang yang ada. Selain itu keterbatasan dana juga menjadi hambatan. Dana yang ada sebagian besar masih terkonsentrasi untuk kegiatan rutin sehingga kegiatan utama belum dapat optimal karena pagu dana yang kecil.

Beberapa program kegiatan telah disesuaikan sehingga diperlukan penyesuaian target kinerja maupun output dan output spesifiknya.

Strategi untuk mengoptimalkan kekuatan dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Kesamben yaitu:

1. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan program Bupati dan Wakil Bupati.
2. Memanfaatkan / menerapkan kemajuan teknologi.
3. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan tupoksi.
4. Menggunakan pedoman dan juknis dalam pelaksanaan kegiatan.

5. Memanfaatkan uraian tugas / kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten dan otonomi daerah.
6. Memanfaatkan peran swasta untuk melengkapi sarana dan prasarana serta menggali potensi SDA yang ada.
7. Mengembangkan kemampuan pegawai untuk mengikuti perkembangan teknologi.

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah . **Visi kepala daerah terpilih periode 2021-2026 adalah “KABUPATEN BLITAR BERDAYA DAN BERJAYA”**”.

Visi tersebut mengandung makna strategis dalam upaya membangkitkan kembali kejayaan daerah agar “Kawentar”, atau dikenal luas dan disegani. Istilah “Kawentar” berasal dari bahasa Jawa, yang bermakna masyhur, terkenal, dan terkemuka. Pemilihan istilah ini mencerminkan tekad Pemerintah Kabupaten Blitar untuk menjadikan daerahnya sebagai aktor penting dalam dinamika pembangunan di tingkat lokal, regional, nasional, bahkan internasional

Visi ini tidak hanya menjadi simbol harapan, tetapi juga mengarahkan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan daya saing daerah. Pemerintah Kabupaten Blitar menegaskan komitmennya dalam mengoptimalkan potensi daerah yang berlimpah, baik dari sisi sumber daya alam maupun kualitas sumber daya manusia, untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Semangat “Blitar Kawentar” menegaskan identitas Kabupaten Blitar sebagai wilayah yang memiliki keunggulan khas. Keunggulan ini tidak hanya terletak pada kekayaan alamnya, tetapi juga pada karakter masyarakat yang toleran, religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong. Kondisi sosial-budaya yang demikian menjadi pondasi kokoh dalam mengakselerasi pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Blitar memposisikan diri sebagai motor penggerak utama pembangunan, sekaligus sebagai fasilitator dan dinamisator dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Melalui penguatan peran tersebut, pemerintah berupaya menciptakan sinergi dengan sektor swasta dan masyarakat sipil dalam rangka membangun ekosistem pembangunan yang inklusif dan kolaboratif. Pendekatan *collective actions* atau pembangunan berbasis kebersamaan diyakini mampu mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dengan kolaborasi yang solid antar-stakeholder, daya saing daerah akan semakin menguat. Kabupaten Blitar dapat menjadi lebih berdaya, yakni memiliki kemampuan dan kemandirian

dalam menghadapi tantangan global dan regional. Pada akhirnya, visi kejayaan yang diusung akan terwujud, ditandai dengan peningkatan kinerja sektorsektor unggulan, pemulihan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi, serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran secara signifikan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi membantu menjelaskan gambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Selain itu dalam perumusan misi harus memperhatikan faktor-faktor strategis baik eksternal berupa tantangan dan peluang maupun internal yang berupa kekuatan dan kelemahan, sehingga misi yang disusun tidak hanya menerjemahkan visi semata. Tetapi juga sebagai *problem solving* permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Blitar tahun 2025-2029. Maka dalam RPJMD ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

Misi pembangunan disusun sebagai rumusan strategi yang memandu arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, sehingga selaras dengan visi serta tujuan jangka menengah dan panjang daerah. Melalui misi, arah pembangunan menjadi lebih jelas dan sistematis, serta dapat diterjemahkan ke dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat berlangsung secara terarah, efisien, dan berkelanjutan. Selain berfungsi sebagai instrumen perencanaan, misi pembangunan juga memegang peranan penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Misi yang dirumuskan dengan baik memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memahami arah dan strategi pembangunan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Blitar. Pemahaman ini akan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan, serta memungkinkan masyarakat untuk menilai Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlak, Sehat Jasmani dan Rohani, Inklusif, Berpendidikan yang Baik, Berdaya Saing, melalui Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Optimalisasi Potensi Generasi Muda yang Siap Menyongsong Indonesia Emas Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi

Berbasis Potensi Lokal Didukung Infrastruktur yang Mantap, Berwawasan Lingkungan, Berpihak dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat maupun Dunia Usaha Menuju Agroindustri Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Aktif Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat Menjamin ketentraman, Ketertiban, ketangguhan bencana serta kebebasan Beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbudaya dan berbudi pekerti yang luhur sejauh mana capaian pemerintah terhadap komitmen pembangunan yang telah ditetapkan. Adapun penjelasan atas empat misi tersebut adalah sebagai berikut:

Misi pertama : menjelaskan bahwa Manusia adalah aktor utama dalam pembangunan, oleh karenanya manusia harus menjadi fokus utama pembangunan. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi krusial agar memiliki karakter yang baik, kesehatan yang prima, serta tingkat pendidikan yang memadai. Dengan memastikan bahwa masyarakat, terutama generasi muda, mendapatkan akses terhadap pendidikan berkualitas, fasilitas kesehatan yang baik, serta lingkungan yang mendukung pengembangan karakter dan keterampilan, Kabupaten Blitar ingin menciptakan masyarakat yang siap menghadapi tantangan masa depan, termasuk era Indonesia Emas 2045.

Misi kedua : menjelaskan bahwa Fokus pembangunan ekonomi harus berorientasi pada produktivitas sektor unggulan dengan penyiapan kelembagaan ekonomi yang mantap dan berfokus pada optimalisasi pemanfaatan potensi lokal. Penguatan ekonomi daerah menjadi kunci dengan mengoptimalkan potensi lokal, seperti sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, serta industri kecil dan menengah (IKM). Dalam mewujudkan hal tersebut, Kabupaten Blitar akan fokus pada pembangunan infrastruktur yang baik dan berkelanjutan serta memperhatikan aspek lingkungan dan mempersiapkan pondasi menuju Agroindustri.

Misi ketiga : menjelaskan bahwa Birokrasi yang sehat adalah salah satu sarana mempercepat pembangunan bukan tujuan pembangunan. Sebuah prasyarat yang harus dimiliki terlebih dahulu agar dapat melakukan pembangunan secara efektif dan efisien. Orientasi utama penyelenggaraan pemerintahan adalah meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital untuk

menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

Misi keempat : menjelaskan bahwa ketenteraman, ketertiban, serta kebebasan masyarakat merupakan kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan. Terjaminya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang ada di masyarakat, menjadi modal awal bagi terselenggaranya pembangunan di Kabupaten Blitar. Moderasi dalam menjalankan agama dan keyakinan menjadi pondasi utama dalam mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang guyub, rukun, tepa selira dan harmonis. Peran Pemerintah Daerah diperlukan dalam menciptakan tata kehidupan masyarakat dan menjaga harmonisasi sosial dalam rangka terselenggaranya roda pemerintahan dan pembangunan yang kondusif bagi seluruh masyarakat, serta menjamin kebebasan beragama bagi semua kelompok. Stabilitas sosial ini menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah.

Sesuai dengan uraian visi dan misi Bupati terpilih diatas serta selaras dengan tugas dan fungsi, Kecamatan Kesamben mendukung pencapaian **Misi ke tiga** : menjelaskan bahwa Birokrasi yang sehat adalah salah satu sarana mempercepat pembangunan bukan tujuan pembangunan. Sebuah prasyarat yang harus dimiliki terlebih dahulu agar dapat melakukan pembangunan secara efektif dan efisien. Orientasi utama penyelenggaraan pemerintahan adalah meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kesamben untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka Kecamatan Kesamben mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang bertujuan :

- memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat

- mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
- memperpendek proses pelayanan
- mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau

Tetapi di dalam proses pelaksanaannya Kecamatan Kesamben masih mengalami hambatan diantaranya :

- a) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan terutama pada jajaran pelaksana, sehingga tugas dibebankan seringkali *overload*;
- b) Masih belum optimalnya Kecamatan Kesamben dalam memahami program dan kegiatan yang dituangkan dalam DPA Perangkat Daerah;
- c) Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan;
- d) Sarana dan prasarana yang tidak mendukung kelancaran pelayanan (jumlah sarpras yang tersedia terbatas);
- e) Belum adanya ruangan arsip yang memadai.

Berdasarkan hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, maka perlu dilakukan rencana strategis oleh Kecamatan Kesamben, antara lain:

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik);
2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah;
3. Peningkatan Penataan Organisasi dan Manajemen Publik;
4. Peningkatan pemahaman tentang Pengelolaan Keuangan dan Barang

Rencana strategis yang akan dilakukan kecamatan Kesamben inilah yang merupakan indikator kunci keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*).

2.4 . Review Terhadap Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat:

1. Rancangan kerangka ekonomi daerah
2. Program prioritas pembangunan daerah dan
3. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Kesamben berdasarkan RKPD Kabupaten Blitar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja PD se-Kabupaten

Blitar yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Kesamben.

Berdasarkan Rancangan Tema Pembangunan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2025 yakni: “Penguatan SDM Unggul dan Ekosistem Ekonomi Lokal untuk kemandirian Ekonomi Daerah.” dari tema tersebut kemudian dijabarkan menjadi 5 Prioritas. Adapun 5 (Lima) prioritas Pembangunan Daerah, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan, kesehatan dan percepatan Pengentasan kemiskinan;
2. Meningkatkan Kapasitas SDM Pelaku Ekonomi dan Penguatan Pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan produktifitas Ekonomi Lokal dan penguatan manajemen Distribusi Barang;
4. Peningkatan e-Government dan pelayanan Publik;
5. Pemantapan Infrastruktur Ekonomi serta Daya Dukung Lingkungan Hidup.

Berdasarkan isu strategis Kabupaten Blitar dan isu strategis Kecamatan Kesamben, serta disesuaikan dengan target kinerja Tahun 2025, maka dilakukan analisa kebutuhan. Sehingga dari Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Kesamben dilakukan analisa secara mendalam sehingga diperoleh Rancangan Akhir Rencana Kerja 2026 dengan Hasil Analisa Kebutuhan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4.1
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Blitar

Nama SKPD : Kecamatan Kesamben

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catan Penting		
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif			
1	2	3	12	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Kesamben	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada progrsm penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Persen	1.775.549.254	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Kesamben	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada progrsm penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	2.028.341.970	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kesamben	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	100	Persen	10.594.284	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kesamben	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	Persen	100	7.450.000	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kesamben	Jumlah Dokumen renstra dan renja Perangkat Daerah yang disusun	19	Dokumen	10.594.284	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kesamben	Jumlah Dokumen renstra dan renja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	19	7.450.000	
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Kesamben	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	100	Persen	1.469.631.300	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Kesamben	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	Persen	100	1.469.631.300	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kesamben	JumlahASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan ASN	16	Orang	1.422.971.300	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kesamben	JumlahASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	10	1.422.971.300	
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Kesamben	umlah ASN yang disediakan Administrasi pelaksanaan Tugas	9	Orang	37.860.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Kesamben	umlah ASN yang disediakan Administrasi pelaksanaan Tugas	Orang	9	37.860.000	

1.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Kesamben	Jumlah laporan Akuntansi dan Keuangan SKPD	21	Laporan	8.200.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Kesamben	Jumlah laporan Akuntansi dan Keuangan SKPD	Laporan	21	8.200.000	
1.2.4	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Kec. Kesamben	Jumlah Laporan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	Laporan	600.000	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Kec. Kesamben	Jumlah Laporan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	12	600.000	
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Kesamben	Presentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang dikelola dengan baik	100	Persen	2.850.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Kesamben	Presentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang dikelola dengan baik	Persen	100	2.850.000	
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Kesamben	Jumlah laporan rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Laporan	2.850.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Kesamben	jumlah laporan rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	2	2.850.000	
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Kesamben	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	40.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Kesamben	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	40.000.000	
1.4.1	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kec. Kesamben	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	16	Orang	40.000.000	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kec. Kesamben	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	Orang	16	40.000.000	
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Kesamben	Persentase pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	100	Persen	44.494.516	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Kesamben	Persentase pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	Persen	100	92.806.250	
	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kesamben	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	jenis	1.537.500	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kesamben	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	jenis	6	3.961.500	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Kesamben	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	jenis	3.177.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Kesamben	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	jenis	2	3.567.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kesamben	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	jenis	3.587.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kesamben	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	jenis	4	3.299.750	

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Kesamben	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	9.692.016	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Kesamben	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	12.936.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kesamben	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	kali	25.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kesamben	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali	12	65.192.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Kesamben	Jumlah Waktu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	bulan	1.500.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Kesamben	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bulan	12	3.850.000	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Kesamben	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	100	persen	45.625.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Kesamben	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	persen	100	14.738.900	
Pengadaan Mebel	Kec. Kesamben	Jumlah Mebel yang Diadakan	2	unit	25.625.000	Pengadaan Mebel	Kec. Kesamben	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	2	-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kesamben	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	2	Unit	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kesamben	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	14.738.900	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kesamben	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	100	Persen	85.600.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kesamben	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	Persen	100	134.225.520	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kesamben	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	20.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kesamben	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan	12	25.875.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kesamben	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	12	bulan	20.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kesamben	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	31.439.400	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kesamben	Jumlah waktu Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	12	bulan	45.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kesamben	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	bulan	12	76.911.120	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kesamben	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai sasaran	100	Persen	76.754.154	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kesamben	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Persen	100	266.640.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kesamben	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	12	bulan	40.900.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Kesamben	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	bulan	12	67.200.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kesamben	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	unit	3.284.779	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kesamben	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	6	8.560.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kesamben	Jumlah Rumah Jabatan dan mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	1	paket	32.569.375	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kesamben	Jumlah Rumah Jabatan dan mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	paket	1	190.880.000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Kesamben	persentase desa dengan predikat IKM baik	90	Persen	71.158.900	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Kesamben	persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik	Persen	90	23.550.000	

Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kesamben	Jumlah koordinasi yang diselenggarakan di Tingkat Kecamatan	2	Kali	36.606.139	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kesamben	Jumlah koordinasi yang diselenggarakan di Tingkat Kecamatan	Kali	2	10.200.000	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Kesamben	Jumlah Koordinasi yang di Laksanakan	2	kali	22.391.183	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Kesamben	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	kali	2	5.100.000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Presentase Peningkatan Efektifitas Pemerintahan	90	persen	14.214.956	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			persen	90	5.100.000	
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Kesamben	Jumlah Layanan yang dilaksanakan	1	layanan	21.237.665	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Kesamben	Jumlah Layanan yang dilaksanakan	layanan	1	6.600.000	
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kesamben	Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	4	kali	21.237.665	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kesamben	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	kali	4	6.600.000	
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Kesamben	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan	1	kali	13.315.096	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Kesamben	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan	kali	1	6.750.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kesamben	Jumlah dokumen PPAT	50	dokumen	13.315.096	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kesamben	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	dokumen	50	6.750.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Kesamben	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	pemberdayaan	210.630.400	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Kesamben	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	pemberdayaan	1	28.700.000	

	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Kesamben	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	2	kali	210.630.400	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Kesamben	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	kali	2	17.300.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kesamben	Tingkat Partisipasi Masyarakat	100	persen	109.229.558	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kesamben	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	persen	100	9.950.000	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Kesamben	Jumlah Sinkronisasi yang dilaksanakan	2	kali	101.400.842	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Kesamben	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	kali	2	7.350.000	
	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Kesamben	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan			11.220.000	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Kesamben	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan			11.400.000	
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kec. Kesamben	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	100	keluarga	11.220.000	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kec. Kesamben	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara			11.400.000	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kesamben	Jumlah koordinasi dan fasilitasi penegakan perda dan perkara yang dilakukan	2	kali	185.013.100	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kesamben	Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	kali	2	40.493.830	

Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kesamben	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	6 kali	150.013.100	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kesamben	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	kali	6	33.463.830
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kesamben	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	4 kali	122.163.100	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kesamben	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	kali	4	25.963.830
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Kesamben	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	2 kali	27.850.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Kesamben	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	kali	2	7.500.000
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Kesamben	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi penegakan perda dan perkada yang dilakukan	1 kali	35.000.000	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Kesamben	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi penegakan perda dan perkada yang dilakukan	kali	1	7.030.000
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Kesamben	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	1 kali	35.000.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Kesamben	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	kali	1	7.030.000
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Kesamben	Jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yang dilakukan	3 kali	99.622.500	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Kesamben	Jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yang dilakukan	kali	3	22.130.000
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Kesamben	Jumlah koordinasi yang diselenggarakan	3 kali	99.622.500	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Kesamben	Jumlah koordinasi yang diselenggarakan	kali	3	22.130.000

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Kesamben	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	1	kali	20.707.250	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Kesamben	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	kali	1	10.600.000
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Kesamben	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi yang dilaksanakan	1	kali	57.492.750	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Kesamben	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	kali	1	5.900.000
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Kesamben	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	1	kali	21.422.500	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Kesamben	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	kali	1	5.630.000
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kesamben	Jumlah peraturan perundang-undangan desa yang dibuat	20	peraturan perundang-undangan desa yang dibuat	113.854.200	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kesamben	Jumlah peraturan perundang-undangan desa yang dibuat	peraturan perundang-undangan desa yang dibuat	20	47.500.000
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kesamben	Jumlah Rekomendasi, koordinasi dan pengawasan yang dilaksanakan	10	Rekomendasi, koordinasi dan pengawasan	113.854.200	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kesamben	Jumlah Rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan yang dilaksanakan	kali	12	47.500.000

Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Kesamben	Jumlah Fasilitasi yang di Laksanakan	10	kali	7.500.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Kesamben	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	kali	10	8.300.000	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kesamben	Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan	10	kali	7.496.825	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kesamben	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	kali	10	-	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Kesamben	Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan	10	kali	8.500.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan	Kec. Kesamben	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	kali	10	4.500.000	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan	10	kali	6.982.375	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan	kali	10	6.750.000	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Kesamben	Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan			-	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Kesamben	Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan			-	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Kesamben	Jumlah Sinkronisasi yang dilaksanakan	2	kali	39.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Kesamben	Jumlah Sinkronisasi yang dilaksanakan	kali	2	6.750.000	
Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kec. Kesamben	Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan	2	kali	6.375.000	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kec. Kesamben	Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan	kali	2	4.500.000	
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Kesamben	Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan	10	kali	7.500.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Kesamben	Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan	kali	10	7.700.000	

	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec. Kesamben	Jumlah Fasilitas yang dilaksanakan	10	kali	6.250.000	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec. Kesamben	Jumlah Fasilitas yang dilaksanakan	kali	10	9.000.000	
						2.455.828.354						2.190.715.800	

2.5 Penelaian Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat

Setiap penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat RT/RW(MUSDUS), Desa/Kelurahan (MUSRENBANGDES/MUSDES), Kecamatan sampai kabupaten. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD yang menitikberatkan pada sinkronisasi Rencana Kerja antar OPD dan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat agar tujuan dan sasaran yang telah diamanatkan dalam visi dan misi daerah dapat dicapai sesuai rencana yang telah ditentukan.

Kegiatan musyawarah pembangunan ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memadu serasikan perencanaan bottom up dengan perencanaan top down sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya didalam bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kondisi seperti ini pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha dapat terlibat secara bersama-sama dalam proses pembangunan mulai dari membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil-hasil pembangunan partisipatif yang telah diatur dalam Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP). Berikut adalah usulan Program dan kegiatan yang disetujui pada Musrenbang tahun 2025

Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan

Kecamatan : Kesamben
Tanggal : 20 Februari 2025
Tempat : Aula Kecamatan Kesamben

PP1: PEMERATAAN KONEKTIVITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN & PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA	OPD TUJUAN AWAL
1	PP1	2044165	Pemeliharaan Berkala Jalan	Pemeliharaan Ruas jalan Kabupaten yang menghubungkan Desa Tapakrejo dengan Desa Bumirejo yang kondisi jalannya rusak. Lokasi Berada di Wilayah Dusun Sumbermangku RT.02 RW.02. SK Jln.Kab.No.469 (Sumbermangku - Sumberkunci) Panjang 1,170 km dan SK Jln.Kab.No.470 (Sumberkunci - Sukorejo) Panjang 1,730 km	Dusun Sumbermangku RT.02 RW.02. Desa Tapakrejo. Kecamatan Kesamben, Kab. Blitar	Kesamben	Tapakrejo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	PP1	2015665	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kondisi jalan rusak berlubang berbahaya bagi pengendara motor atau pengguna jalan lain nya	DusunSanggrahan RT.01 RW.02 SampaiDusun Jugo RT.01 RW.01 Kab. Blitar	Kesamben	Jugo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	PP1	1942431	Rehabilitasi Jembatan	1. jembatan sudah ambrol tergerus aliran air per desember 2024 2. merupakan jalur penghubung 2 desa 3. merupakan jalur alternatif menuju binangun dari arah timur, jika ada kemacetan di wilayah desa kesamben (jalur wlingi karangkates) 4. akses menuju pusat perekonomian dan pendidikan dari desa pagergunung ke desa kesamben 5. keluhan warga dusun tambak yang di sampaikan melalui surat kepada Kepala Desa Kesamben, jika harus melalui jalur utama memutar jauh.dan memakan waktu yang lama	Dusun Kesamben RT 02 RW 08 Desa Kesamben, Kab. Blitar	Kesamben	Kesamben	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA	OPD TUJUAN AWAL
4	PP1	1942443	Pemeliharaan Berkala Jalan	Jalan merupakan penghubung antar desa Pagerwojo dan Tepas sekaligus penghubung antar Kecamatan yaitu Kecamatan Kesamben dan Kecamatan Doko, pada kondisi saat ini kondisi sudah rusak dan perlu ada pengaspalan HOTMIX	Dsn Rembang, Kab. Blitar	Kesamben	Tepas	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	PP1	1980165	Peningkatan SPAM (tandon/pipanisasi)	Kurang Maksimal nya jaringan air bersih	Ds. Bumirejo, Kab. Blitar	Kesamben	Bumirejo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PP2: PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN & PENGEMBANGAN HILIRISASI PERTANIAN								
1	PP2	2025409	Pelatihan Budidaya Ikan Konsumsi	KURANG PEMAHAMANNYA WARGA DALAM PEMELIHARAAN IKAN LAIK KONSUMSI	KANTOR DESA KEMIRIGEDE RT.003 RW.001, Kab. Blitar	Kesamben	Kemirigede	Dinas Peternakan dan Perikanan
2	PP2	2073447	Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Disaat musim penghujan air sering tersumbat oleh tumbuhan yang tumbuh di dalam saluran irigasi dan di saat musim kemarau air tidak sampai ke hillr atau ke bagian ujung dikarenakan banyak yang bocor ke samping saluran irigasi.	Dusun Sembung RT.02 RW.06 Saluran Jirak Kerep, Kab. Blitar	Kesamben	Pagergunung	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	PP2	2073481	Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Disaat musim penghujan air sering tersumbat oleh tumbuhan yang tumbuh di dalam saluran irigasi dan di saat musim kemarau air tidak sampai ke hillr atau ke bagian ujung dikarenakan banyak yang bocor ke samping saluran irigasi.	Dusun Pehlumbu RT.01 RW.01, Saluran Arah Jugo, Kab. Blitar	Kesamben	Pagergunung	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA	OPD TUJUAN AWAL
PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, Penguatan Industri & UMKM, Serta Pengembangan Pariwisata dan Ekraf untuk Pembangunan Ekonomi								
1	PP3	2021669	Bintek SDM Pariwisata	Kurangnya SDM yang memadai	KANTOR DESA KEMIRIGEDE, Kab. Blitar	Kesamben	Kemirigede	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	PP3	2078175	Bintek Ekonomi Kreatif	perlu peningkatan sumber daya manusia terkait potensi pariwisata di Desa Jugo Yang perlu di kembangkan	Desa Jugo kesamben Blitar, Kab. Blitar	Kesamben	Jugo	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	PP3	2026396	Pelatihan Digital Marketing	KURANGNYA PEMAHAMAN PELAKU USAHA DALAM DUNIA DIGITAL UNTUK PEMASARAN PRODUKNYA	KANTOR DESA KEMIRIGEDE RT.003 RW.001, Kab. Blitar	Kesamben	Kemirigede	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PP4: PEMBANGUNAN SDM YANG INKLUSIF & PERLINDUNGAN SOSIAL YANG ADAPTIF								
1	PP4	1882636	Pengadaan mebelair Sekolah untuk lembaga jenjang SD	Meja kursi untuk proses belajar sudah tidak layak serta perlunya matras sebagai alat bantu kegiatan olahraga. Lokasi ada di UPT SDN Pagerwojo 1	Dusun Krajan RT 018 RW 005 Desa Pagerwojo, Kab. Blitar	Kesamben	Pagerwojo	Dinas Pendidikan
2	PP4	2020471	Pembangunan Perpustakaan Sekolah untuk lembaga jenjang SD	BELUM ADANYA SARANA PERPUS YANG MEMADAI	DS. KEMIRIGEDE RT.002 RW.001 KEC. KESAMBEN, Kab. Blitar	Kesamben	Kemirigede	Dinas Pendidikan
3	PP4	2068181	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pembangunan Pagar, Toilet Kamar Mandi, Prasarana Utilitas Sekolah) untuk lembaga jenjang SD	Toilet kamar mandi siswa sudah tidak layak di gunakan perlu perbaikan	SDN JUGO V (Lima) Desa Jugo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, Kab. Blitar	Kesamben	Jugo	Dinas Pendidikan
4	PP4	2023904	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah untuk lembaga jenjang SD	"banyaknya bangunan kelas yang rusak, atapnya sudah lepas - lepas dan atap nya juga bergelombang jadi dikhawatirkan akan membahayakan siswa - siswi yang belajar d ruang kelas tersebut. Lokasi : SDN Sukoanyar 02 Dsn. Sukoanyar Rt 02 Rw 01 Volume : 1 Unit Est. Biaya : Rp. 200.000.000,-"	Dsn. Sukoanyar Rt 02 Rw 01, Kab. Blitar	Kesamben	Sukoanyar	Dinas Pendidikan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA	OPD TUJUAN AWAL
5	PP4	1940803	Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD	Ruang kelas yang ada saat ini numpang di balai dusun dan tidak memenuhi syarat dikarenakan murid banyak ruangan sempit.	Dusun Pagergunung Rt 01 Rw 01, Kab. Blitar	Kesamben	Pagergunung	Dinas Pendidikan
PP5: PENINGKATAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK								
1	PP5	2000877	Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa	Ketidaktertiban data aset desa, kurangnya transparansi, kesulitan dalam perencanaan pembangunan, perebutan aset (prioritas 1, P5)	Dusun Krajan RT 011 RW 003 Desa Pagerwojo, Kab. Blitar	Kesamben	Pagerwojo	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	PP5	2026205	Peningkatan kapasitas BPD	KURANGNYA SDM BPD	KANTOR DESA KEMIRIGEDE RT.003 RW.001, Kab. Blitar	Kesamben	Kemirigede	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

PENA INTAN

1	PENA INTAN	2080943	Bantuan Sosial Alat Bantu Kruk (PENA INTAN)	Penyandang disabilitas termasuk keluarga prasejahtera sehingga tidak mampu membeli alat bantu jalan (kruk)	Desa Jugo Kesamben Blitar, Kab. Blitar	Kesamben	Jugo	Dinas Sosial
2	PENA INTAN	2086036	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Perempuan (PENA INTAN)	banyaknya warga masyarakat Desa Sukoanyar yang belum mengetahui bagaimana prosedur pelaporan kekerasan seksual pada perempuan. Dan kurangnya pengetahuan warga mengenai kekerasan seksual pada perempuan.	Dsn. Sukoanyar Rt 02 Rw 01, Kab. Blitar	Kesamben	Sukoanyar	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA	OPD TUJUAN AWAL
3	PENA INTAN	2078128	Bantuan Sosial Alat Bantu Alat Bantu Dengar (PENA INTAN)	Warga mengalami gangguan pendengaran dan tidak bisa mendengar	Desa Jugo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, Kab. Blitar	Kesamben	Jugo	Dinas Sosial

Kesamben, 20 Februari 2025



 CAMAT KESAMBEN

HERI WIDYATMOKO, S.Pt

Pembina Tk I

NIP. 1972 0115 199803 1006

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Tujuan kebijakan nasional pemerintah republik indonesia adalah reformasi birokrasi, ada 4 tujuan reformasi birokrasi dengan 8 area perubahan antara lain:

1. Pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dengan area perubahan:
 - Manajemen perubahan (mind set dan culture set)
 - Penguatan pengawasan
 - Penguatan akuntabilitas kinerja
2. Efektivitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan, dengan area perubahan :
 - Penataan dan penguatan organisasi
 - Penataan sumber daya manusia (SDM)
3. Peningkatan kualitas pengambilan kebijakan, dengan area perubahan :
 - Penataan peraturan penundang-undangan
 - Penataan tatalaksana
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan area perubahan :
 - Peningkatan kualitas pelayanan publik

Kualitas penyelenggaraan pelayanan umum (*publik*) di daerah masih perlu ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Banyak hal yang menyebabkan belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan tersebut, misalnya keterbatasan sarana pelayanan, perilaku petugas yang belum bersifat melayani, tidak jelasnya waktu, dan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan publik serta panjangnya prosedur yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu jenis pelayanan publik.

Oleh karenanya daerah diharapkan terus memiliki prakarsa dalam melakukan perbaikan pelayanan. Prakarsa daerah dalam meningkatkan pelayanan publik tentunya harus sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kepuasan masyarakat. Masyarakat berhak memberikan masukan, koreksi dan perbaikan terhadap pelayanan. Inilah yang disebut manajemen publik masa kini (*new publik management*) yang memiliki ciri bahwa kewenangan berada pada petugas pelayanan dan pelanggan, menekankan pada pelayanan yang "**menyentuh hati**" dan perombakan visi dan misi pelayanan. Yang berarti masyarakat dianggap sebagai pemilik saham (*shareholder*) sehingga pelayanan lebih menekankan pada kualitas sebagai hasil negosiasi kepentingan masyarakat dan pemerintah. Dengan kata lain posisi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik berubah dari "**dilayani**" menjadi "**melayani**".

Posisi kecamatan menjadi sangat penting mengingat banyak pihak berharap agar kecamatan mampu berperan sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat. Fungsi kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat ini menjadi relevan bila dilihat dari segi kedekatan jarak, kecepatan waktu dan kualitas pelayanan yang diberikan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang merupakan bentuk jawaban dan respon dari pemerintah akan tuntutan perbaikan kualitas pelayanan publik khususnya di pelayanan yang bersifat administratif dimana pemerintah menetapkan Kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan administrasi yang terdepan dengan tujuan terpenuhinya prinsip-prinsip pelayanan agar pelayanan semakin dekat dengan masyarakat sehingga pelayanan akan semakin efektif dan efisien. Dan didalam permendagri yang dimaksud mengamanatkan bahwa penyelenggara PATEN harus terselenggara di seluruh Kecamatan se Indonesia.

Salah satu arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional 2010 – 2014 dilaksanakan dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tatanan pengelolaan manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip – prinsip tertentu, diantaranya : keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggara pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendaliannya. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan terwujud dalam pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas dan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi. Ketiganya merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan. Tanpa pemerintahan yang bersih akan sulit dicapai pengelolaan sumber daya pembangunan secara akuntabel yang akan berakibat langsung padamenurunnya kualitas pelayanan publik serta menghilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan Renja OPD merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi. Berdasarkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), tujuan pada Tahun 2026 adalah :

1. Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat;

2. Meningkatnya tertib penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan desa
3. Terciptanya iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pemenuhan hak – hak azasi manusia

Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga harus bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kesamben dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi adalah:

1. Menciptakan pelayanan Publik yang mudah dan dan cepat untuk kesejahteraan masyarakat
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana serta prasarana kantor pendukung pelayanan
3. Meningkatnya ketepatan waktu penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan pemerintah
5. Meningkatnya ketentraman, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan dukungan stakeholder

3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Kesamben maka dapat disimpulkan bahwa fungsi utama pemerintah daerah khususnya Kecamatan Kesamben adalah penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat, oleh karena itu optimalisasi pelayanan publik yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama Kecamatan Kesamben agar dapat menyajikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat kecamatan Kesamben. Pendekatan Pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk mendorong pemerintah daerah khususnya kecamatan Kesamben melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan public sehingga dengan hal tersebut diatas yang merupakan bahan pertimbangan di dalam menyusun/merumuskan program dan kegiatan SKPD Kecamatan Kesamben pada tahun 2025 yang merupakan salah satu bentuk dukungan nyata terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah yaitu “*Baldatun Thoyibatun Wa Robbun Ghofur*”.

Di Tahun 2026 pada Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar terdapat 6 (enam) Program dan 17 (tujuh Belas) Kegiatan.

Dalam rangka pelaksanaannya maka program, kegiatan dan pendanaan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

Program yang ditetapkan oleh Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - b. Koordinasi Penerapan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dari uraian di atas maka rumusan program daerah pada tahun 2026 ialah

1. Peningkatan fasilitas pelayanan di kecamatan
2. Peningkatan Optimalisasi teknologi informasi guna mendukung proses pelaksanaan tugas.

Berikut adalah tabel rencana program dan kegiatan Kecamatan Kesamben Tahun 2026

Tabel 3.3.1
Rumusan rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2026 Dan prakiraan Maju Tahun 2027
Provinsi Jawa Timur Kabupaten Blitar

Nama SKPD : Kecamatan Kesamben

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	10		11
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada progrsm penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Kesamben	100	Persen	2.028.341.970	DAU		Persen	100	1.775.549.254
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	Kec. Kesamben	100	Persen	7.450.000	DAU		Persen	100	10.594.284
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen renstra dan renja Perangkat Daerah yang disusun	Kec. Kesamben	19	Dokumen	7.450.000	DAU		Dokumen	19	10.594.284
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	Kec. Kesamben	100	Persen	1.469.631.300	DAU		Persen	100	1.469.631.300
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	JumlahASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kesamben	16	Orang	1.422.971.300	DAU		Orang	16	1.422.971.300
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	umlah ASN yang disediakan Administrasi pelaksanaan Tugas	Kec. Kesamben	9	Orang	37.860.000	DAU		Orang	9	37.860.000

			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Akuntansi dan Keuangan SKPD	Kec. Kesamben	21	Laporan	8.200.000	DAU		Laporan	21	8.200.000
			koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Kesamben	12	Laporan	600.000	DAU		Laporan	12	600.000
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang dikelola dengan baik	Kec. Kesamben	100	Persen	2.850.000	DAU		Persen	100	2.850.000
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Kesamben	2	Laporan	2.850.000	DAU		Laporan	2	2.850.000
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Kesamben	100	Persen	40.000.000	DAU		Persen	100	40.000.000
			Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	Kec. Kesamben	16	Orang	40.000.000	DAU		Orang	16	40.000.000
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	Kec. Kesamben	100	Persen	92.806.250	DAU		Persen	100	44.494.516
			Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Kesamben	6	jenis	3.961.500	DAU		jenis	6	1.537.500
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Kesamben	2	jenis	3.567.000	DAU		jenis	2	3.177.500
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Kesamben	4	jenis	3.299.750	DAU		jenis	4	3.587.500
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Kesamben	1	Paket	12.936.000	DAU		Paket	1	9.692.016
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kesamben	12	kali	65.192.000	DAU		kali	12	25.000.000

			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Waktu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Kesamben	12	bulan	3.850.000	DAU		bulan	12	1.500.000
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	Kec. Kesamben	100	persen	14.738.900	DAU		persen	100	45.625.000
			Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Diadakan	Kec. Kesamben	2	unit	-	DAU		unit	2	25.625.000
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	Kec. Kesamben	2	Unit	14.738.900	DAU		Unit	2	20.000.000
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	Kec. Kesamben	100	Persen	134.225.520	DAU		Persen	100	85.600.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kesamben	12	bulan	25.875.000	DAU		bulan	12	20.000.000
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kesamben	12	bulan	31.439.400	DAU		bulan	12	20.000.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Kec. Kesamben	12	bulan	76.911.120	DAU		bulan	12	45.600.000
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai sasaran	Kec. Kesamben	100	Persen	266.640.000	DAU		Persen	100	76.754.154

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizininan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Kec. Kesamben	12	bulan	67.200.000	DAU		bulan	12	40.900.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Kesamben	6	unit	8.560.000	DAU		unit	6	3.284.779
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rumah Jabatan dan mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	Kec. Kesamben	1	paket	190.880.000	DAU		paket	1	32.569.375
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase desa dengan predikat IKM baik	Kec. Kesamben	90	Persen	23.550.000	DAU		Persen	90	71.158.900
			Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi yang diselenggarakan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kesamben	2	Kali	10.200.000	DAU		Kali	2	36.606.139
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi yang di Laksanakan	Kec. Kesamben	2	kali	5.100.000	DAU		kali	2	22.391.183
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase Peningkatan Efektifitas Pemerintahan		90	persen	5.100.000	DAU		persen	90	14.214.956
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Layanan yang dilaksanakan	Kec. Kesamben	1	layanan	6.600.000	DAU		layanan	1	21.237.665
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	Kec. Kesamben	4	kali	6.600.000	DAU		kali	4	21.237.665
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan	Kec. Kesamben	1	kali	6.750.000	DAU		kali	1	13.315.096

				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dokumen PPAT	Kec. Kesamben	50	dokumen	6.750.000	DAU		dokumen	50	13.315.096
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Kesamben	1	pemberdayaan	28.700.000	DAU		pemberdayaan	1	210.630.400
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	Kec. Kesamben	2	kali	17.300.000	DAU		kali	2	210.630.400
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Kec. Kesamben	100	persen	9.950.000	DAU		persen	100	109.229.558
				Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Sinkronisasi yang dilaksanakan	Kec. Kesamben	2	kali	7.350.000	DAU		kali	2	101.400.842
				Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kec. Kesamben			11.400.000	DAU				11.220.000
				Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kec. Kesamben	100	keluarga	11.400.000	DAU		keluarga	100	11.220.000
				Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi dan fasilitasi penegakan perda dan perkara yang dilakukan	Kec. Kesamben	2	kali	40.493.830	DAU		kali	2	185.013.100
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kec. Kesamben	6	kali	33.463.830	DAU		kali	6	150.013.100

			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kec. Kesamben	4 kali	25.963.830	DAU		kali	4	122.163.100
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kec. Kesamben	2 kali	7.500.000	DAU		kali	2	27.850.000
			Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi penegakan perda dan perkara yang dilakukan	Kec. Kesamben	1 kali	7.030.000	DAU		kali	1	35.000.000
			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kec. Kesamben	1 kali	7.030.000	DAU		kali	1	35.000.000
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yang dilakukan	Kec. Kesamben	3 kali	22.130.000	DAU		kali	3	99.622.500
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi yang diselenggarakan	Kec. Kesamben	3 kali	22.130.000	DAU		kali	3	99.622.500
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	Kec. Kesamben	1 kali	10.600.000	DAU		kali	1	20.707.250

			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi yang dilaksanakan	Kec. Kesamben	1	kali	5.900.000	DAU		kali	1	57.492.750
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	Kec. Kesamben	1	kali	5.630.000	DAU		kali	1	21.422.500
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah peraturan perundang-undangan desa yang dibuat	Kec. Kesamben	20	peraturan perundang-undangan desa yang dibuat	47.500.000	DAU		peraturan perundang-undangan desa yang dibuat	20	113.854.200
			Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi, koordinasi dan pengawasan yang dilaksanakan	Kec. Kesamben	10	Rekomendasi, koordinasi dan pengawasan	47.500.000	DAU		kali	12	113.854.200
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi yang di Laksanakan	Kec. Kesamben	10	kali	8.300.000	DAU		kali	10	7.500.000
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan	Kec. Kesamben	10	kali	-	DAU		kali	10	7.496.825
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan	Kec. Kesamben	10	kali	4.500.000	DAU		kali	10	8.500.000
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan		10	kali	6.750.000	DAU		kali	10	6.982.375
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan	Kec. Kesamben			-	DAU				-
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Sinkronisasi yang dilaksanakan	Kec. Kesamben	2	kali	6.750.000	DAU		kali	2	39.000.000
			Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan	Kec. Kesamben	2	kali	4.500.000	DAU		kali	2	6.375.000
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan	Kec. Kesamben	10	kali	7.700.000	DAU		kali	10	7.500.000

				Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitas yang dilaksanakan	Kec. Kesamben	10	kali	9.000.000	DAU		kali	10	6.250.000
									2.190.715.800					2.455.828.354

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar pada tahun 2026 mengelola 6 Program, 17 Kegiatan dan 46 Sub kegiatan yang seluruhnya bersumber dari dana APBD II. Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026 merupakan program, kegiatan dan sub kegiatan baru sesuai dengan PMDN nomor 90 tahun 2019. Total pagu anggaran 2026 senilai Rp. 2.592.247.001,00

Tabel 4.1
Program Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2026
Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Dana
	Kecamatan Kesamben	2.592.247.001
	UNSUR KEWILAYAHAN	2.592.247.001
	KECAMATAN	2.592.247.001
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.028.341.970,00
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.240.000,00
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.380.000,00
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.380.000,00
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.380.000,00
1.1.4	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	3.100.000,00
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.460.830.282,00
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.404.205.282,00
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48.015.000,00
1.2.3	Koordinasi dan Pelaksana Akutansi SKPD	4.290.000,00
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.200.000,00
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.120.000,00
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.120.000,00
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	65.000.000,00
1.4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	65.000.000,00
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	55.789.100,00
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.112.500,00
1.5.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.565.600,00
1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.500.000,00
1.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.086.000,00
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.675.000,00
1.5.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.850.000,00
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39.368.900,00
1.6.1	Pengadaan Mebel	13.936.200,00

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Dana
1.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.732.700,00
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.843.750,00
1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.089.000,00
1.7.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.102.382,00
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	84.652.368,00
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.760.000,00
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.200.000,00
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.560.000,00
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.000.000,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25.050.000,00
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.800.000,00
2.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6.700.000,00
2.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.100.000,00
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	6.700.000,00
2.2.1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6.700.000,00
2.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6.550.000,00
2.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6.550.000,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	130.985.000,00
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	72.060.000,00
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.260.000,00
3.1.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	28.750.000,00
3.1.3	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	30.050.000,00
3.2	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	58.925.000,00
3.2.1	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	41.225.000,00
3.2.2	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	17.700.000,00
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	43.922.400,00
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	36.932.400,00

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Dana
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	29.232.400,00
4.1.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.700.000,00
4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6.990.000,00
4.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6.990.000,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	34.790.000,00
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	34.790.000,00
5.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	7.900.000,00
5.1.2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasiona	19.000.000,00
5.1.3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5.190.000,00
5.1.4	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2.700.000,00
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	438.907.569,00
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	438.907.569,00
6.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8.300.000,00
6.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.100.000,00
6.1.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.750.000,00
6.1.5	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	394.057.569,00
6.1.6	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6.700.000,00
6.1.7	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	4.500.000,00
6.1.8	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8.000.000,00
6.1.9	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4.500.000,00

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN KESAMBENKAB. BLITAR
TAHUN 2026**

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renja OPD Tahun 2026	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Malu Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah		
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah				
1		Kecamatan Kesamben					2.358.457.297,00						16	2.756.127.396,00		
7		UNSUR KEWILAYAHAN					2.358.457.297,00							2.756.127.396,00		
7	01	KECAMATAN					2.358.457.297,00							2.756.127.396,00		
1	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	-	-			2.198.761.147,00							2.060.569.202,00		
7	01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	-	-			12.100.000,00							10.859.141,00		
7	01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat				19 Dokumen	12.100.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	-	-	10.859.141,00	KECAMATAN KESAMBEN	
7	01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			1.437.372.797,00							1.781.014.450,00		
7	01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	1.390.712.797,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	-	-	1.736.076.512,00	KECAMATAN KESAMBEN	
7	01 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi				9 Dokumen	37.860.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	-	-	40.000.000,00	KECAMATAN KESAMBEN	
7	01 01 2.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi				21 Dokumen	8.200.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	-	-	1.260.750,00	KECAMATAN KESAMBEN	
7	01 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan				12 Laporan	600.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	3.677.188,00	KECAMATAN KESAMBEN	
7	01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	-	-			2.850.000,00							4.307.563,00		
7	01 01 2.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2.850.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	-	-	4.307.563,00	KECAMATAN KESAMBEN	
7	01 01 2.05	Administrasi Kewasudanaan	-	-			100.000.000,00							20.000.000,00		
7	01 01 2.05 0004	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan				16 Orang	100.000.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	20.000.000,00	KECAMATAN KESAMBEN	
7	01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			131.957.050,00							39.858.649,00		
7	01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang				6 Paket	3.932.100,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	1.575.938,00	KECAMATAN KESAMBEN	
7	01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang				2 Paket	3.690.650,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	-	-	3.256.938,00	KECAMATAN KESAMBEN	
7	01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	3.311.200,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	-	-	3.553.957,00	KECAMATAN KESAMBEN	
7	01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang				1 Paket	12.998.100,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	-	-	9.934.316,00	KECAMATAN KESAMBEN	
7	01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat				12 Laporan	104.825.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	-	-	20.000.000,00	KECAMATAN KESAMBEN	
7	01 01 2.06 0014	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

3	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	-	-	-	-	28.700.000,00										223.107.100,00		
	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	-	17.300.000,00										211.887.100,00		
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																
						Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan				100 Lembaga Masyarakat	9.950.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	-	-	111.960.297,00	KECAMATAN KESAMBEN	
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja				2 Dokumen	7.350.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	-	-	99.926.803,00	KECAMATAN KESAMBEN	
	7	01	03	2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	-	-	11.400.000,00											11.220.000,00	
	7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Masyarakat Berbanesa dan Bernegara																
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Masyarakat				100 Keluarga	11.400.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	-	-	11.220.000,00	KECAMATAN KESAMBEN	
4	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	-	-	-	-	36.747.250,00										186.117.100,00		
	7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban	-	30kali	-	-	30.598.900,00										6kali	150.242.100,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi				4 Laporan	23.098.900,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	-	-	121.695.850,00	KECAMATAN KESAMBEN	
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh				2 Laporan	7.500.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	-	-	28.546.250,00	KECAMATAN KESAMBEN	
	7	01	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	-	0kali	-	-	6.148.350,00										1kali	35.875.000,00	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik				1 Laporan	6.148.350,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	-	-	35.875.000,00	KECAMATAN KESAMBEN	
5	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN	-	-	-	-	19.198.900,00											100.216.900,00	
	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	-	15kali	-	-	19.198.900,00										3kali	100.216.900,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun																
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan				1 Orang	8.400.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	-	-	20.707.250,00	KECAMATAN KESAMBEN	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																
						Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan				1 Orang	5.200.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	-	-	57.551.587,00	KECAMATAN KESAMBEN	
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan				1 Orang	5.598.900,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	-	-	21.958.063,00	KECAMATAN KESAMBEN	

6	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERKAWASAN	-	-	-	-	50.700.000,00								114.533.594,00	
	7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Perencanaan Desa	-	-	-	-	50.700.000,00								114.533.594,00	
	7	01	06	2.01	0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa					10 Dokumen	8.300.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.597.500,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7	01	06	2.01	0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					10 Dokumen	0,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.684.240,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7	01	06	2.01	0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa					10 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.712.500,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7	01	06	2.01	0004 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan					10 Laporan	0,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.373.045,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7	01	06	2.01	0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa					10 Dokumen	6.750.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.156.934,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7	01	06	2.01	0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					0 Dokumen	0,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7	01	06	2.01	0008 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa dan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah					2 Dokumen	6.750.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		39.975.000,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7	01	06	2.01	0010 Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan					2 Dokumen	7.700.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.534.375,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7	01	06	2.01	0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegekan Batas Desa dan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegekan Batas Desa					1 Dokumen	0,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.406.250,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7	01	06	2.01	0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya dan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					50 Laporan	7.700.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.687.500,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7	01	06	2.01	0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan dan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayahnya					10 Laporan	9.000.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.406.250,00	KECAMATAN KESAMBEN
											2.358.457,29							2.756.127.396,00	

BAB V

PENUTUP

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kesamben maka dapat disimpulkan bahwa Fungsi utama pemerintah daerah khususnya Kecamatan Kesamben adalah penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat, oleh karena itu optimalisasi pelayanan publik yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama Kecamatan Kesamben agar dapat menyajikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat.

Didasarkan pada isu-isu strategis yang berkembang di Kecamatan Kesamben antara lain :

1. Reformasi birokrasi pemerintah daerah
2. Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah
3. Peningkatan Pelayanan Publik hingga ke desa
4. Belum tersedia Ruang arsip Vital

Tetapi di dalam proses pelaksanaannya Kecamatan Kesamben masih mengalami hambatan-hambatan diantaranya :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan terutama pada jajaran staf, sehingga tugas dibebankan seringkali *overload*;
2. Perencanaan yang sudah di tetapkan Masih bisa berubah tergantung dari situasi kebutuhan yang ada;
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan;
4. Sering adanya pergantian/mutasi pegawai yang menduduki pekerjaan yang vital seperti bendahara pengeluaran, barang dan gaji;
5. Penataan administrasi khususnya arsip dokumen yang kurang baik.

Berdasarkan isu-isu strategis dan hambatan yang dialami Kecamatan Kesamben, maka diperlukan Rencana Tindak Lanjut yang harus dilakukan oleh Kecamatan Kesamben untuk mencapai hasil yang diinginkan antara lain:

1. Mengusulkan tambahan staf kepada BKPSDM Kabupaten Blitar, walaupun pada kenyataannya sulit untuk dipenuhi;
2. Meningkatkan Sistem Perencanaan yang terintegrasi dengan baik yang dituangkan dalam DPA PD dengan cara mengusulkan kepada Pengguna Anggaran (PA) terkait untuk menyiapkan Bimtek penyusunan program dan kegiatan kepada semua PPTK;
3. Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) untuk dapatnya mengubah manajemen publik konvensional dengan menggunakan manajemen publik yang berbasis IT;
4. Mengusulkan kepada pimpinan khususnya perbaikan pada penataan arsip dokumen vital.

Kesamben, 14 Agustus 2025


CAMAT KESAMBEN
HERI WIDYATMOKO, S.Pt.
Pembina Tingkat 1
NIP: 19720115 199803 1 006